

ANALISIS SKALA EKONOMIS PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

SUHEL

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

This research also to analyze economies of scale . From this analysis, we will get the degree of Islamic Banking Industry, that is economies or diseconomies degree. The object of this research is Commonly Islamic Banking/ Bank Umum Syariah (BUS) that has operated at least since 2005. This research is using data panel during 2005- 2009 period. The data used is data of quarterly bank unit from financial report of Islamic Banking, there are contain the data of total financing, earnings, current assets, cost of employee, fixed assets and total deposits. From the calculation, has found that during 2005 – 2009 period, Islamic Banking Industry, from the calculation has found that economies of scale is more than 1 , it is mean that Islamic Banking Industry is in economies of scale condition. Individually, Islamic Banking also shows the same condition. The values shows that the existence of Islamic Banking Industry relatively has a good performance.

Keywords: Economic of Scale, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1992, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Walaupun terkesan lamban dalam perkembangannya, namun selama periode krisis ekonomi tahun 1997/1998, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing finances*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Data menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih baik dalam menyalurkan dana kepada sektor produksi dengan LDR berkisar antara 113 – 117 persen . Sejak diterbitkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, perkembangan perbankan syariah relatif signifikan dengan berdirinya beberapa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki perbankan konvensional (Bank Indonesia, 2008). Guncangan krisis ekonomi yang menerpa perbankan Indonesia memberi pelajaran bahwa ada inefisiensi dalam operasional perbankan konvensional. Perbankan syariah juga terkena dampaknya, namun kinerja efisiensi perbankan syariah masih relatif lebih baik daripada perbankan konvensional.

Berkaitan dengan efisiensi dan skala ekonomi pada industri perbankan syariah hal ini menjadi pusat perhatian pada tingkat pengelola perbankan maupun pada tingkat pengambil kebijakan secara makro. Pada tingkat mikroekonomi, struktur pasar perbankan bersifat

oligopoli, dimana para pengelola bank menikmati keuntungan relatif lebih besar daripada dalam struktur pasar persaingan sempurna (Bank Indonesia, 2008) Beberapa kajian tentang efisiensi industri perbankan syariah sudah dilakukan dengan berbagai variasi variabel maupun metode yang digunakan. Dalam kesempatan ini akan dikaji tentang analisis skala ekonomis pada industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian efisiensi ekonomi pada industri perbankan syariah. Organisasi penulisan adalah sebagai berikut pendahuluan, studi kepustakaan metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup.

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Fundamental Sistem Perbankan Syariah

Kerangka dasar sistem perbankan syariah adalah suatu aturan dan hukum, secara bersama disebut sebagai Syariah. Syariah merupakan aturan yang diturunkan dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Beberapa prinsip dasar sistem perbankan syariah dapat diringkas sebagai berikut (Umer Chapra, 2002)

1. Larangan riba. Larangan ini dimulai dari adanya pelarangan yang tegas terhadap riba. Tidak diragukan lagi bahwa riba diharamkan oleh al- Qur'an maupun al-hadits. Al-Qur'an mengharamkannya dalam empat ayat yang berbeda. Pertama adalah ayat Qs. 30:39 di Mekkah, dan yang tiga lainnya (Qs. 4:161, Qs. 3:130-132 dan Qs. 2:275-281) adalah di Madinah. Yang terakhir dari semua ayat ini (Qs. 2:275-281) muncul menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Ayat ini melarang keras orang yang mengambil riba, dan menyatakan mereka dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga menetapkan perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, serta memerintahkan kaum Muslim untuk meninggalkan semua riba yang masih ada, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil jumlah pokok pinjaman saja, dan membebaskan jika peminjam mengalami kesulitan.
2. Berbagi resiko. Ketika bunga dilarang, Islam mendorong para pemilik dana menjadi investor. Sehingga konsep investor ini merupakan pengganti konsep kreditur dalam kerangka perbankan konvensional. Penyedia modal dan usahawan berbagi atas risiko bisnis, demikian pula mereka akan berbagi keuntungan ketika mendapatkan laba.
3. 3. Uang sebagai modal "potensial". Dalam pandangan Islam uang merupakan modal "potensial". akan menjadi modal nyata ketika uang tersebut bekerjasama dan bergabung dengan sumber daya lain untuk melakukan suatu aktivitas produktif. Islam mengakui nilai kontribusi uang, ketika ia bertindak sebagai modal yang digunakan untuk aktivitas usaha.
4. Larangan perilaku spekulatif. Sistem keuangan Islam tidak menghendaki penimbunan (hoarding) dan melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian, perjudian, dan beresiko ekstrim.
5. Kesucian akad (kontrak). Islam menegakkan kewajiban sesuai dengan akad (kontrak) dan keterbukaan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi asimetrik dan moral hazard
6. Aktivitas yang disetujui Syariah. Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang memenuhi persyaratan untuk investasi. Sebagai contoh, investasi bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, dan barang haram dilarang oleh Islam.

Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Konsep syariah telah menyediakan berbagai akad yang berbeda untuk mencukupi kebutuhan para pemilik dan pengguna dana dalam berbagai bentuknya. Akad-akad dasar dalam konsep syariah meliputi; pembiayaan *cost plus (murabahah)*, profit-sharing

(*mudarabah*), persewaan (*ijarah*), persekutuan (*musharakah*), dan penjualan dengan pesanan (*bay' salam*). Akad-akad tersebut merupakan blok bangunan dasar yang dapat dikembangkan secara lebih kompleks dalam perbankan syariah. Akad-akad tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Umair Capra, 2002) :

1. Akad yang populer dalam perbankan syariah adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. *Murabahah* (juga disebut *bay' mu'ajjal*) merujuk pada penjualan dimana penjual membeli barang-barang yang diinginkan pembeli dan menjualnya pada harga lebih tinggi yang sudah disepakati, pembayaran ditetapkan pada waktu tertentu, baik dalam bentuk cicilan atau tunai. Penjual menanggung risiko atas barang-barang sampai penyerahan pada pembeli.

Salam: merujuk pada kesepakatan penjualan dimana pembayaran dilakukan dimuka atas kewajiban untuk menyerahkan barang yang ditentukan pada tanggal tertentu yang disepakati di masa depan. Ini tidak sama dengan penjualan *forward* yang spekulatif karena pembayaran harus penuh, bukan sebagian. *Istishna* merujuk kepada kesepakatan dimana pembuat barang (kontraktor) sepakat untuk memproduksi (membangun) dan menyerahkan barang (kontruksi) dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Ini, sebagaimana *salam*, merupakan pengecualian dari aturan umum syariah yang tidak membolehkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimiliki dan dikuasainya. Tetapi, tidak seperti *salam* harga tidak mesti dibayar dimuka. Harga bisa dibayar dalam bentuk cicilan sesuai dengan keinginan pihak yang bertransaksi, atau sebagian di depan dan sisanya kemudian sebagaimana disepakati. Akad ini secara luas sering digunakan untuk pembiayaan jangka pendek sebagaimana transaksi tradisional untuk pembiayaan pembelian barang. Dalam akad ini investor menyediakan atau membeli barang atau komoditas yang spesifik, kemudian dilakukan kontrak yang disetujui bersama untuk terjadinya penjualan kembali kepada klien (pembeli). Margin keuntungan ditentukan atas kesepakatan bersama.

2. Akad Persewaan (*ijarah*). *Ijarah* dapat digunakan untuk pembiayaan sarana transportasi, mesin, peralatan, dan pesawat terbang. Format *ijarah* dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa dengan membayar jumlah tertentu dari sisa angsuran juga diizinkan (sewa beli).
3. Akad Profit-Sharing (*mudarabah*). *Mudharabah* merujuk pada kesepakatan antara dua atau lebih orang dimana satu atau lebih dari mereka menyediakan pembiayaan, sedangkan yang lainnya menyediakan manajemen. Tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Keuntungan bisa dibagi antara penyandang dana dan manajemen sesuai dengan proporsi yang disepakati. Tetapi, kerugian hanya ditanggung oleh penyandang dana sesuai dengan bagian mereka dari keseluruhan modal. Kerugian manajer adalah tidak mendapatkan keuntungan atas kerjanya. Akad ini merupakan bentuk mekanisme investasi di mana bank mengelola kumpulan dana (*pool of funds*). Modal oleh bank kemudian diinvestasikan dalam berbagai aktivitas usaha. Para nasabah deposan berbagi resiko dan laba sesuai proporsi investasi masing-masing.
4. Partisipasi modal (*musyarakah*). *Musyarakah* juga merupakan kesepakatan antara dua atau lebih orang. Tetapi, tidak seperti *mudharabah*, semua pihak memberikan kontribusi keuangan maupun kewirausahaan dan manajemen, mesti tidak harus sama rata. Bagian keuntungan mereka bisa sesuai dengan kesepakatan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan proporsi modal mereka. Akad ini sama dengan mekanisme usaha patungan klasik. Kedua usahawan dan investor berkontribusi modal (aset, keahlian teknis dan managerial, modal kerja) sesuai dengan kesepakatan.

Konsep Bagi Hasil Dalam Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sector riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat macro maupun mikro (Ascarya,2007). Nilai-nilai makro dimaksud adalah nilai keadilan, *masalahah*, system zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulasi yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar). Nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan Syariah adalah sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathonah*.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharring*), ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Jika usaha menghasilkan keuntungan dibagi dua, dan jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (Ascarya, 2007)

Konsep Skala Ekonomis

Perusahaan menikmati skala ekonomis jika dapat menggandakan outputnya dengan biaya kurang dari dua kali lipat. Sehubungan dengan hal ini, skala ekonomis terjadi jika penggandaan output membutuhkan biaya lebih dari dua kali lipat. Skala ekonomis dan skala dis ekonomis juga berlaku apabila proporsi input bervariasi, skala pengembalian hanya berlaku jika proporsi input tetap.

Jika output bertambah, biaya rata-rata perusahaan untuk memproduksi output tersebut cenderung menurun paling tidak untuk tingkat tertentu. Hal ini dapat terjadi untuk beberapa alasan berikut :

1. Jika perusahaan beroperasi pada skala yang lebih besar, tenaga kerja akan bekerja dalam kondisi spesialisasi dimana kondisinya menjadi paling produktif.
2. Skala produksi dapat menimbulkan fleksibilitas. Dengan variasi kombinasi input untuk memproduksi output, perusahaan dapat mengatur proses produksi yang lebih efektif.
3. Perusahaan dapat saja memperoleh sejumlah input pada harga yang lebih rendah, karena perusahaan tersebut membeli input dalam jumlah besar sehingga memperoleh harga yang lebih murah. Kombinasi input ini kemungkinan berpengaruh terhadap skala produksi, jika perusahaan mengambil keuntungan dari harga input yang lebih murah tersebut.

Namun demikian pada suatu titik sangat mungkin bahwa biaya produksi rata-rata akan meningkat seiring dengan bertambahnya output. Ada beberapa alasan untuk hal ini, yaitu :

1. Mengatur perusahaan yang lebih besar menjadi semakin kompleks dan tidak efisien karena tugas semakin bertambah.
2. Keuntungan membeli suatu input produksi dalam jumlah besar akan berkurang pada jumlah tertentu. Hal ini disebabkan pasokan input utama menjadi terbatas dan harga input tersebut akhirnya naik.

Untuk menganalisis hubungan antara skala produksi dan biaya perusahaan, perlu diketahui kapan proporsi input berubah, ekspansi perusahaan tidak lagi dalam proporsional dan konsep skala pengembalian tidak lagi berlaku. Dengan kata lain, perusahaan yang sedang menikmati skala ekonomis ketika dapat melipatgandakan outputnya dengan biaya lebih sedikit. Sebaliknya, perusahaan berada dalam skala disekonomis ketika output yang dihasilkan memerlukan lebih banyak biaya. Istilah skala ekonomis termasuk pula bertambahnya skala pengembalian pada kasus tertentu. Namun demikian, istilah tersebut dikenal lebih umum karena menggambarkan proporsi input yang berubah ketika perusahaan mengubah tingkat produksinya. Dalam kondisi demikian, kurva biaya jangka panjang menunjukkan bahwa

perusahaan sedang berada pada skala ekonomi untuk tingkat output yang relatif rendah dan berada pada skala disekonomi pada tingkat output yang lebih tinggi.

Skala ekonomi sering diukur dengan elastisitas output – biaya, E_c merupakan perubahan persentase dalam biaya produksi karena peningkatan satu persen output.

$$E_c = (dC/C)/(dQ/Q) \dots\dots\dots 1)$$

Untuk melihat hubungan E_c dengan biaya, maka persamaan (2.4) dapat ditulis sebagai berikut:

$$E_c = (dC/dQ)/(C/Q) = MC/AC \dots\dots\dots 2)$$

Jelaslah bahwa E_c adalah sama dengan satu ketika biaya marginal dan biaya rata-rata sama, kemudian biaya – biaya meningkat secara proporsional bersama dengan output dan tidak ada skala ekonomis dan dis ekonomis (skala pengembalian tetap berlaku jika proporsi input tetap). Bila ada skala ekonomis (peningkatan biaya kurang proporsional dengan output), biaya marginal kurang dari rata-rata (keduanya menurun), dan E_c kurang dari satu. Akhirnya bila terdapat skala dis ekonomis, biaya marginal lebih besar daripada biaya rata-rata dan E_c lebih besar dari satu.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis hasil penelitian ada dua pendekatan yang akan ditempuh yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan kuantitatif atau penggunaan model regresi. Pendekatan deskriptif dalam hal ini akan menjelaskan secara umum, tentang perkembangan perbankan syariah pada periode penelitian yaitu 2005 – 2009, khususnya yang berkaitan dengan variabel input dan variabel output dimana variabel-variabel ini sebagai variabel utama dalam penelitian ini. Kemudian peralatan statistika dan ekonometrika akan melengkapi khususnya dalam pengujian model-model yang akan digunakan. Data yang digunakan bersumber dari laporan bulanan perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah tiga bank umum syariah (BUS), yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Panel data dalam pembuatan model penelitian.

1. Fungsi Biaya Pada Industri Perbankan Syariah

Spesifikasi model persamaan fungsi biaya pada industri perbankan syariah dapat ditulis dalam bentuk translog sebagai berikut

$$\begin{aligned} \ln TC_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \ln(TP_{it}) + \alpha_2 \ln(Y_{it}) + \alpha_3 \ln(X_{it}) + \beta_1 \ln(BS_{it}) + \beta_2 \ln(AT_{it}) + \beta_3 \ln(TS_{it}) + \frac{1}{2} [\\ & \delta_1 \ln(TP_{it}).\ln(Y_{it}) + \delta_2 \ln(TP_{it}).\ln(X_{it}) + \delta_3 \ln(Y_{it}).\ln(X_{it})] + \frac{1}{2} [\gamma_1 \ln(BS_{it}).\ln(AT_{it}) + \\ & \gamma_2 \ln(BS_{it}).\ln(TS_{it}) + \gamma_3 \ln(AT_{it}).\ln(TS_{it})] + \rho_1 \ln(TP_{it}).\ln(BS_{it}) + \rho_2 \ln(Y_{it}).\ln(AT_{it}) + \\ & \rho_3 \ln(X_{it}).\ln(TS_{it}) + e \dots\dots\dots 3) \end{aligned}$$

Keterangan: TC adalah biaya total, Y adalah variabel output. yang terdiri atas TP = Total Pembiayaan; Y = Pendapatan; X = Aktiva Lancar; W adalah variabel input yang terdiri atas BS : Biaya Staf; AT : Aktiva Tetap; TS : Total Simpanan; i : bank dan t : waktu

2. Skala Ekonomis Pada Industri Perbankan Syariah

Skala ekonomis perbankan syariah diestimasi dengan cara menderivasi total *Cost Elasticity* terhadap output (Mester 1987), sebagai berikut :

$$\text{Skala} = 1 / \sum_{i=1}^m \delta \ln TC / \delta \ln Y_i \dots\dots\dots 4)$$

Dimana $\sum_{i=1}^m \delta \ln TC / \delta \ln Y_i$ adalah merupakan penjumlahan secara individual dari masing-masing bank atas *cost elasticities*, Dengan merujuk pada teori, ketentuan skala ekonomi adalah sebagai berikut:

- jika > 1 maka pada derajat skala ekonomis
- jika < 1, maka pada derajat skala dis ekonomis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan

Pada bagian ini akan dijelaskan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Tahun 2005 merupakan fase kedua dalam rencana jangka panjang perbankan syariah di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah (2002 – 2011) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pada fase ini pusat perhatian pada peningkatan efisiensi dan daya saing perbankan syariah. Walaupun pada periode ini terjadi krisis keuangan namun krisis tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi perbankan syariah nasional. Kondisi perbankan syariah nasional yang masih dalam perkembangan awal dan belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global berdampak pada terhindarnya bank syariah dari pengaruh langsung krisis tersebut.

Perkembangan industri perbankan syariah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif positif., walaupun terjadi fluktuasi perekonomian Indonesia. Tabel berikut menggambarkan perkembangan Aset, dana pihak ketiga (DPK) dan Pembiayaan pada industri perbankan syariah di Indoensia.

Tabel 1. Perkembangan Aset, DPK dan Pembiayaan Pada Industri perbankan Syariah di Indonesia (dalam milyar rupiah)

Uraian	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aset	20,880	26.722	36.538	49.555	66.09	97.519
DPK	15.584	20.672	28.012	36.852	52.271	76.036
Pembiayaan	15.232	20.445	27.944	38.195	46.886	68.181

Sumber : Diolah dari Statistik Bulanan Perbankan Syariah – Bank Indonesia

Tahun 2005 merupakan tahun yang sulit dan penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Beberapa indikator ekonomi makro penting yang melandasi penetapan sasaran inflasi dan arah kebijakan Bank Indonesia di awal tahun, ternyata mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan. Berbagai permasalahan mendasar di dalam negeri yang belum tertangani dengan baik di tengah kondisi melonjaknya harga minyak dunia dan siklus pengetatan moneter global telah berdampak buruk pada kestabilan ekonomi makro, yang tercermin dari memburuknya transaksi berjalan, melemahnya nilai tukar, dan tingginya inflasi IHK. Akibatnya, kinerja perekonomian 2005 yang sempat terakselerasi di awal tahun secara berangsur-angsur mengalami perlambatan (Bank Indonesia, 2005)

Perlambatan pertumbuhan yang dihadapi oleh perekonomian juga berdampak kepada perkembangan industri perbankan syariah yaitu sebesar 36,4%, sementara dalam 2 tahun sebelumnya mencapai pertumbuhan di atas 90%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset sebesar

Rp 20.880 milyar, DPK Rp 15.584 milyar dan total pembiayaan sebesar Rp 15.232 milyar. Variabel utama yang berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah pada tahun 2005 adalah kenaikan suku bunga dan inflasi. Suku bunga yang tinggi, dimana kondisi ini lebih menarik bagi nasabah mengambang, hal ini kemudian berpengaruh terhadap DPK perbankan syariah. Pada sisi pembiayaan bank syariah, produk pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad jual beli (khususnya murabahah), disisi lain perbankan syariah harus menghadapi tingginya laju inflasi, sehingga produk pembiayaan perbankan syariah menjadi relatif lebih mahal

Walaupun dari sisi volume usaha mengalami penurunan pertumbuhan, namun perbankan syariah secara umum dapat menunjukan kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat dari kualitas aset, profitabilitas dan jangkauan serta jaring perbankan syariah yang terus berkembang Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2005), menunjukan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah masih berjalan efektif sebagaimana tercermin dari komposisi aset yang didominasi pembiayaan kepada sektor riil terutama sektor usaha kecil dan menengah dengan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) mencapai 97,8%.

Pemulihan ekonomi global yang semakin menguat di akhir tahun 2009 memberikan optimisme perkembangan ekonomi di tahun 2010 meskipun sempat diwarnai oleh krisis Yunani yang terjadi awal triwulan II 2010 namun krisis tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi perbankan syariah nasional (Outlook Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2011). Kondisi perbankan syariah nasional yang masih dalam perkembangan awal dan belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global serta tidak signifikannya eksposur valas yang dimiliki perbankan syariah nasional, berdampak pada terhindarnya bank syariah dari pengaruh langsung krisis tersebut.

Sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi yaitu sebesar 43,99% meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,55% dengan pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang juga relatif tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2009 jumlah pembiayaan yang dihimpun dalam tahun 2010 sebesar Rp. 68.181 milyar. Secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga masih memiliki fundamental yang cukup kuat untuk memanfaatkan potensi membaiknya perekonomian nasional.

Komposisi DPK Perbankan Syariah di Indonesia

Pertumbuhan perbankan syariah memacu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terus meningkat. Data lima tahun terakhir menunjukkan DPK mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tabel berikut. menunjukkan komposisi DPK pada industri perbankan syariah di Indonesia

**Tabel 2. Komposisi DPK Perbankan Syariah di Indonesia
(dalam milyar rupiah)**

Uraian	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Giro Wadiah	2.048	3.416	3.75	4.238	6.202	9.056
Tabungan Mudharabah	4.367	6.43	9.454	12.471	16.475	22.908
Deposito Mudharabah	9.169	10.826	14.807	20.143	29.595	44.072

Sumber : Diolah dari Statistik Bulanan Perbankan Syariah – Bank Indonesia

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah selama tahun 2005 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2004, yaitu sebesar Rp 3,7 triliun (31,4%) menjadi Rp15,6 triliun. Dari jenisnya, giro wadiah meningkat sebesar Rp0,4 triliun (26,2%), tabungan mudharabah meningkat sebesar Rp 1,1 triliun (33,9%), sedangkan deposito mudharabah meningkat sebesar Rp2,2 triliun (31,4%). Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari pengembangan jaringan kantor dan jangkauan layanan perbankan syariah selama tahun 2005. Peningkatan tersebut juga mengangkat pangsa DPK perbankan syariah di dalam industri perbankan nasional menjadi sebesar 1,38% (Laporan Tahunan Perbankan Syariah, 2005).

Walaupun begitu, peningkatan yang terjadi diikuti dengan peningkatan risiko *displacement* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) akibat peningkatan suku bunga. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kinerja penghimpunan dana perbankan syariah sepanjang tahun 2005 khususnya pada triwulan 3-2005 ketika pertumbuhan DPK hanya sebesar Rp0,4 miliar.. akibat adanya penarikan dana korporasi maupun perorangan yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Meskipun demikian, di akhir tahun, perbankan syariah berhasil memulihkan kembali kepercayaan para deposan yang ditandai dengan pertumbuhan DPK sebesar Rp 2,2 triliun

Dari segi komposisi dana yang dihimpun tidak terjadi perubahan yang signifikan dimana jenis investment deposit (deposito mudharabah) tetap mendominasi. Dengan jumlah deposito yang dihimpun mencapai Rp9,2 triliun selama tahun 2005, pangsa deposito mudharabah pada akhir 2005 tetap sebesar 58,8%, sama dengan pangsa pada tahun 2004. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kepercayaan pemilik dana kepada perbankan syariah dan tentunya dapat membantu bank syariah mengurangi tekanan kebutuhannya akan likuiditas jangka pendek. Namun demikian perlu dicermati bahwa pergeseran orientasi investasi tersebut ditengarai dilakukan oleh kelompok nasabah dengan dinominasi investasi besar yang diduga lebih sensitif terhadap competitiveness tingkat bagi hasil perbankan syariah di tengah industri perbankan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, berlanjutnya trend peningkatan suku bunga simpanan bank konvensional dapat meningkatkan risiko pengalihan dana (*displacement risk*) dari bank syariah ke bank konvensional khususnya oleh nasabah korporasi yang umumnya memiliki denominasi investasi cukup besar.

Pada tahun 2008, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK pada triwulan ketiga, pertumbuhan jumlah rekening DPK juga mengalami hal serupa. Kondisi ini ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya pertumbuhan jumlah rekening DPK dari 42,83% di triwulan keempat tahun 2007 menjadi 32,34% pada triwulan keempat tahun 2008 (Bank Indonesia, 2008). Kondisi perlambatan pertumbuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK jenis giro iB dengan akad wadiah yang pada akhir triwulan pertama 2008 sempat mengalami penurunan dan secara bertahap meningkat kembali sampai dengan posisi Mei 2008. Namun sejak triwulan kedua sampai dengan akhir triwulan ketiga, giro iB dengan akad wadiah terus mengalami penurunan terutama pada golongan nasabah korporasi. Pertumbuhan giro korporasi iB pada triwulan ketiga tahun 2008 menurun menjadi 3,99% (yod) dari sebelumnya sebesar 18,47%, pada triwulan ketiga tahun 2007. Dampak dari krisis keuangan global maka untuk mengatasi permasalahan modal, perusahaan cenderung menarik dana likuid dengan return rendah untuk meminimalkan kerugian. Sementara itu, DPK golongan nasabah individu secara konsisten menunjukkan pertumbuhan yang cenderung meningkat

Komposisi jenis produk DPK perbankan syariah terutama berbentuk deposito iB mengalami peningkatan di Triwulan IV tahun 2008 secara berturut-turut dari jangka waktu berdurasi 6, 3 dan 1 bulan, namun demikian terhadap deposito dengan jangka panjang dan tabungan iB dengan akad mudharabah mengalami penurunan. Jika dilihat dari kondisi tersebut produk DPK iB dengan durasi jangka pendek (< 1 tahun) cenderung memiliki daya tarik bagi deposan sebagai alternatif investasi dana mengingat nisbah bagi hasil

dan margin produk tersebut yang meningkat dan relatif lebih tinggi dibanding bunga di konvensional, .

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri Perbankan Syariah pada triwulan IV tahun 2009 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2008, yaitu dengan angka pertumbuhan sebesar 37,7%. Hal tersebut sangat menggembirakan karena pada triwulan I dan II sempat menunjukkan pertumbuhan yang melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2008, yaitu masing-masing sebesar 28,7% (yoy) dan 27,4%

Suatu fenomena yang menarik pula bahwa pertumbuhan DPK pada triwulan IV tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah rekening DPK pada triwulan IV yang hanya sebesar 20,49%, yang merupakan pertumbuhan terendah sejak triwulan I tahun 2008. Hal tersebut mencerminkan bahwa peningkatan pertumbuhan DPK lebih didorong oleh jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah, dibandingkan dengan peningkatan jumlah nasabah baru.

Sampai dengan pertengahan tahun 2010 kinerja penghimpunan dana Perbankan Syariah sempat melambat, namun memasuki triwulan III 2010 mulai mengalami perkembangan dengan laju pertumbuhan 39,16%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di 2009 sebesar 35,19% (Outlook Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2011). Tingginya pertumbuhan DPK tersebut didorong oleh semakin kompetitifnya imbal bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, meskipun secara umum sepanjang tahun 2010 suku bunga Deposito Bank Konvensional cenderung meningkat namun dengan peningkatan kinerja pembiayaannya, Bank Syariah dapat memberikan imbal bagi hasil yang tinggi

Imbal bagi hasil bank syariah yang menarik terutama pada produk Deposito iB membuat produk tersebut lebih diminati masyarakat dibandingkan alternatif penempatan dana lainnya yaitu Tabungan Wadiah iB. Per September 2010 porsi dana masyarakat yang ditempatkan dalam Deposito iB mencapai 57,76%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2009, yang porsinya mencapai 55,77% namun porsi Tabungan Wadiah iB dan Giro Wadiah iB sedikit menurun dari 32,12% menjadi 30,59% untuk Tabungan Wadiah iB dan 12,10% menjadi 11,65% untuk Giro Wadiah iB.

Produk simpanan berjangka lebih diminati masyarakat dibandingkan produk lainnya dengan komposisi lebih besar pada Deposito 1 bulan. Pada triwulan III 2010 tersebut, juga terlihat adanya perubahan preferensi masyarakat terhadap deposito berjangka 12 bulan yang semula 8,38% menurun menjadi 4,93%. Dengan komposisi dana yang cenderung lebih besar pada dana jangka pendek menyebabkan bank syariah mengalihkan sebagian portofolionya pada instrument yang lebih likuid.

Walaupun dari sisi komposisi dana, deposito masih memiliki porsi yang lebih besar bila dibandingkan jenis DPK lainnya, namun terlihat terjadi pegeseran komposisi dimana untuk produk deposito dan giro wadiah porsinya sedikit menurun pada triwulan III 2010 dan tabungan wadiah meningkat menjadi 3,08% dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 1,67%. Peningkatan jumlah tabungan wadiah ini didorong dengan munculnya para pemain baru di perbankan syariah dan munculnya produk tabungan yang dapat menjangkau masyarakat bawah sehingga produk tabungan semakin diminati.

Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah

Jika dilihat dari sisi pembiayaan, industri perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang relatif signifikan dalam lima tahun terakhir. Tabel 3 menjelaskan komposisi pembiayaan industri perbankan syariah di Indonesia.

**Tabel 3. Komposisi Pembiayaan Industri Perbankan Syariah di Indonesia
(dalam milyar rupiah)**

Akad	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Akad Mudharabah	3.124	4.062	4.406	6.205	6.597	8.631
Akad Musyarakah	1.898	2.335	5.578	7.411	10.412	14.624
Akad Murabahah	9.487	12.624	16.553	22.732	26.321	37.508
Akad Salam	0	0	0	0	0	0
Akad Istishna	282	357	351	369	423	347
Akad Ijarah	316	836	516	765	1.305	2341
Akad Qardh	125	250	540	959	1.829	4731
Total	15.232	20.445	27.944	38.195	46.886	68.181

Sumber : Diolah dari Statistik Bulanan Perbankan Syariah – Bank Indonesia

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2005 juga menunjukkan peningkatan sebesar 32,6% jika dibandingkan dengan periode tahun 2004, menjadi Rp15,2 triliun. Berdasarkan Laporan Tahunan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2005, jika dilihat dari kelompok bank, pembiayaan terutama terjadi pada kelompok Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pertumbuhan sebesar 60,4%, sementara kelompok BUS sebesar 27,5%. Peningkatan tersebut mampu meningkatkan pangsa pembiayaan perbankan syariah terhadap total kredit perbankan nasional dari 2,05% pada akhir tahun 2004 menjadi 2,19% pada akhir 2005. Dari jenisnya, peningkatan terutama dialami pada kelompok pembiayaan berbasis bagi hasil yang terdiri atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu masing-masing sebesar Rp1,1 triliun (51,5%) dan 0,6 triliun (49,4%).

Peningkatan kelompok pembiayaan tersebut melebihi peningkatan kelompok pembiayaan berbasis jual beli dan piutang seperti murabahah, istishna dan qard sehingga pangsa pembiayaan berbasis bagi hasil meningkat dari 29% pada tahun 2004 menjadi 33% pada akhir tahun 2005. Faktor yang mendukung peningkatan pangsa pembiayaan bagi hasil tersebut diantaranya adalah makin diminatinya pola bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja dan kerjasama pembiayaan (linkage) bank syariah dengan lembaga keuangan lainnya seperti BPRS, koperasi dan pegadaian. Perkembangan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengembangan pola pembiayaan bagi hasil yang dipandang strategis untuk memperkuat ketahanan industri perbankan syariah dan sistem keuangan secara lebih luas.

Dalam tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa pada periode tahun 2008, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 17,6% dari triwulan keempat tahun 2007 atau menjadi 42,05% pada triwulan keempat tahun 2008, meskipun kondisi di tahun 2008 tersebut mengalami perlambatan sejak posisi pada Triwulan ke II sebesar 51%. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp 38,19 triliun. Struktur pembiayaan masih didominasi oleh akad murabahah, pertumbuhan penyaluran dana dengan akad murabahah yaitu sekitar 58% atau sebesar 22,7 triliun pada tahun 2008, kemudian diikuti oleh pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah, masing-masing dengan nilai sebesar Rp 7,4 triliun dan Rp 6,2 triliun .

Pada periode tahun 2010, kegiatan penyaluran dana perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan meningkat signifikan dengan laju pertumbuhan 34,85% lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2009 sebesar 18,16% . Peningkatan pembiayaan ini mengindikasikan peningkatan kinerja sektor riil mengingat bahwa pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebagian besar disalurkan ke sektor riil (Outlook Perbankan

Syariah, 2011). Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pembiayaan dengan akad murabahah masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp 37,5 triliun, kemudian diikuti dengan pembiayaan dengan akad musyarakah dan akan mudharabah masing-masing dengan nilai Rp 14,6 triliun dan 8,6 triliun,

Analisis Skala Ekonomis

Berdasarkan hasil perhitungan skala ekonomis industri perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Skala Ekonomi Industri Perbankan Syariah Di Indonesia

Tahun/TWN	Skala Ekonomi			Industri
	BM	BSM	BSMI	
2005.1	1.9233	1.9208	1.9300	1.9247
2	1.9231	1.9207	1.9298	1.9246
3	1.9230	1.9205	1.9295	1.9243
4	1.9227	1.9203	1.9288	1.9239
2006.1	1.9226	1.9201	1.9288	1.9238
2	1.9225	1.9201	1.9287	1.9238
3	1.9222	1.9200	1.9279	1.9234
4	1.9220	1.9199	1.9276	1.9232
2007.1	1.9220	1.9198	1.9275	1.9231
2	1.9219	1.9197	1.9260	1.9226
3	1.9219	1.9196	1.9257	1.9224
4	1.9218	1.9196	1.9249	1.9221
2008.1	1.9214	1.9195	1.9246	1.9218
2	1.9212	1.9194	1.9245	1.9217
3	1.9210	1.9194	1.9246	1.9217
4	1.9208	1.9182	1.9243	1.9211
2009.1	1.9204	1.9181	1.9243	1.9209
2	1.9195	1.9181	1.9232	1.9203
3	1.9196	1.9180	1.9229	1.9202
4	1.9190	1.9178	1.9228	1.9199
Rata-rata				1,922475

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

Catatan : BM = Bank Muamalat, BSM = Bank Syariah Mandiri, BSMI = Bank Mega Syariah Indonesia

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa selama periode lima tahun terakhir, industri perbankan syariah, selain kinerjanya relatif efisien. Hal tersebut juga diikuti dengan skala ekonomis yang relatif baik. Dari hasil perhitungan secara keseluruhan ditemukan skala ekonomi lebih besar dari 1 (satu) hal ini berarti bahwa industri perbankan syariah menunjukkan skala ekonomis. Secara individu bank juga menunjukkan hal yang sama. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa keberadaan industri perbankan syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Keadaan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah, seperti tercantum dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah.

Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank, selama tahun 2005 industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha yang cukup besar yakni sebesar Rp5,55 triliun (36,2%) sehingga pada akhir periode laporan mencapai Rp20,9 triliun. Peningkatan tersebut mampu meningkatkan pangsa total aset perbankan syariah di dalam industri perbankan nasional dari 1,26% pada akhir tahun 2004 menjadi 1,42% pada akhir 2005. Di sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp3,7 triliun (31,4%) menjadi Rp15,6 triliun sehingga mengangkat pangsa DPK perbankan syariah menjadi sebesar 1,38%. Meski demikian trend meningkatnya suku bunga menyebabkan peningkatan risiko *displacement* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) yang dihadapi perbankan syariah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan DPK perbankan syariah sedikit terhambat khususnya pada triwulan 3-2005 ketika diperkirakan

lebih dari Rp1 triliun dana nasabah dialihkan, meskipun di akhir tahun, perbankan syariah berhasil memulihkan kembali kepercayaan para deposan baik korporasi maupun perorangan yang ditandai dengan pertumbuhan DPK sebesar Rp2,2 triliun (qoq). Sementara itu kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan yang diberikan (PYD) perbankan syariah, juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp3,7 triliun (32,6%) menjadi Rp15,2 triliun. Peningkatan tersebut mampu meningkatkan pangsa pembiayaan perbankan syariah terhadap total kredit perbankan nasional dari 2,05% pada akhir tahun 2004 menjadi 2,19% pada akhir 2005.

Selama semester kedua mengakhiri tahun 2009, pertumbuhan aset Industri perbankan syariah cenderung mengalami perlambatan terutama sejak triwulan kedua, meskipun menunjukkan pertumbuhan aset yang positif Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh kelesuan ekonomi nasional, belum pulihnya daya beli masyarakat, dan biaya ekonomi yang tinggi yang berdampak pada adanya pembatasan ekspansi usaha dan pengurangan konsumsi. Kondisi tersebut merupakan cerminan dari aktifitas sektor riil yang masih dalam masa pemulihan setelah terkena dampak krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat dan ketatnya kredit/likuiditas global pada semester kedua 2008. Selanjutnya pengaruh tersebut relatif menyebabkan perlambatan pertumbuhan di sektor usaha nasional, yang secara tidak langsung mempengaruhi perlambatan perkembangan industri perbankan syariah Indonesia khususnya. Namun perlambatan di industri perbankan syariah relatif kecil jika dibandingkan dengan perlambatan industri keuangan nasional secara umum.

Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah selama tahun 2009 telah mencapai nilai Rp46,9 triliun, bertumbuh 22,74% (yoy) mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan tahun 2008 sebesar 36,70%. Walaupun demikian pertumbuhan penyaluran pembiayaan bank syariah masih lebih baik dibandingkan penyaluran kredit oleh bank konvensional nasional yang hanya bertumbuh 9,96%. Penurunan penyaluran dana tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan ekspor dan penurunan harga berbagai komoditas, belum pulihnya daya beli masyarakat, dan biaya ekonomi tinggi yang berdampak pada adanya pembatasan ekspansi usaha dan pengurangan konsumsi.

PENUTUP

Dari hasil perhitungan secara keseluruhan ditemukan skala ekonomis lebih besar dari 1 (satu) hal ini berarti bahwa industri perbankan syariah menunjukkan skala ekonomis. Secara individu bank juga menunjukkan hal yang sama. Angka-angka tersebut menjelaskan bahwa keberadaan industri perbankan syariah menunjukkan kinerja yang relatif baik. Dengan kata lain bahwa pada periode penelitian 2005-2009, skala ekonomis industri perbankan syariah pada posisi skala hasil balik yang semakin menaik. Hal ini berarti kombinasi dan kualitas input yang dipakai oleh industri perbankan syariah dapat menghasilkan output yang efisien.

Penerapan prinsip kehati-hatian tidak menjadikan jumlah pembiayaan terhambat, namun perlunya pengawasan yang lebih ketat sehingga output pembiayaan dapat lebih optimal. Di sisi lain, variasi bentuk produk pembiayaan yang diinginkan masyarakat perlu ditambah dengan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang ada. Perbankan syariah terus berinovasi dalam pengembangan produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat selain itu penggunaan teknologi perbankan juga harus mendapat perhatian lebih, sehingga industri perbankan syariah mampu bersaing

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik, *Kota Pagar Alam Dalam Angka*, 2006
-----, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Pagar Alam, 2000 – 2006*
Departemen Dalam Negeri.,1991, Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab, Jakarta : *Laporan Akhir Penelitian*, Kerjasama Depdagri dan Pispol UGM Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Insukindro, Mardiasmo, Wahyu Widayat, Wihana Kirana Jaya, Purwanto, Abdul Halim, John Suprihanto, Budi Purnomo, 1994, “Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha peningkatan PAD“, *Laporan hasil penelitian KKD*, FE UGM Yogyakarta.
- Jamaluddin, Ahmad, 1990, Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat-Daerah, Studi Kasus D.I. Aceh, Jawa Timur dan DKI Jakarta, *Desertasi Doktor Ilmu Ekonomi*, UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasi).
- Kaho, Joseph Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Reksohadiprodo, Sukanto, 2000, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Saleh, Samsubar, 1999, *Statistika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi ke-2, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Susanti, H., Ikhsan,M., Widyanti, 1995, *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Edisi Pertama, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.